BAB III

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Pelaksanaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Berdasarkan Perda Sumatera Selatan No 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Penetapan pajak progresif untuk pertama kali didasarkan berdasarkan pada urutan tanggal pendaftaran yang telah direkam pada database objek kendaraan bermotor atau pernyataan wajib pajak. Selanjutnya apabila ada perubahan kepemilikan wajib pajak harus melaporkan untuk urutan kepemilikan. Sejak diterbitkannya Peraturan daerah Sumatera Selatan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, khususnya kota Palembang didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama serta jenis kendaraan yang sama. Tata cara pelaksanaannya diturunkan dalam peraturan gubernur nomor 31 tahun 2016 Berlakunya pajak progresif ini merupakan penerapan pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Yang demikian Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.¹ Adapun Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.² Yang selanjutnya pengertian dari Pajak Kendaraan Bermotor yang disingkat PKB, adalah pajak atas

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat 8.

²Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pasal 1 Ayat 7.

kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.³ Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.⁴

Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang dituangkan dalam pasal 6 ayat 1-5:

PASAL 6

(1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
- b. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

(2) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.

(3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang

³Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pasal 1 Ayat 10.

⁴Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pasal 1 Ayat 8.

ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).

(4) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

(5) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.⁵

Selanjutnya, Tarif Pajak Progresif Untuk Kendaraan Bermotor Tertuang Dalam Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pasal 8 ayat 1-6 tertulis bahwa:

PASAL 8

- (1) Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif .
- (2) Tarif Progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sebagai berikut:
 - a. kepemilikan kedua 2% (dua persen);
 - b. kepemilikan ketiga 2,25% (dua koma dua puluh lima persen)
 - c. kepemilikan keempat dan seterusnya 2,5% (dua koma lima persen)
- (3) Tarif PKB progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan terhadap kepemilikan kendaraan bermotor roda dua dan roda 3, kecuali motor besar dengan isi silender 500cc ke atas dan kendaraan bermotor milik badan.
- (4) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama atau alamat yang sama.

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 6 ayat 1-5.

- (5) Dikecualikan terhadap kendaraan bermotor usia 15 (lima belas) tahun ke atas tidak dikenakan tarif progresif .
- (6) Tata cara pelaksanaan pengenaan pajak progresif diatur dengan Peraturan Gubernur.⁶

Diturunkan lagi ke dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pasal 2 ayat 1-7 tertulis bahwa:

PASAL 2

- (1) Terhadap kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih dan/atau kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan isi silinder 500 cc ke atas.
- (3) Tarif pajak progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap jenis kendaraan sedan, jeep, minibus, station wagon, microbus, bus dan sejenisnya.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan tarif pajak progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terhadap jenis-jenis kendaraan pick up, mobil box, light truck, truck dan sejenisnya.
- (5) Orang pribadi yang memiliki satu kendaraan bermotor roda 2 (dua) satu kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan satu kendaraan bermotor roda 4

⁶Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pasal 8 ayat 1-6.

(empat) atau lebih masing-masing diberlakukan sebagai kepemilikan pertama sehingga tidak dikenakan tarif pajak secara progresif.

- (6) Penentuan kepemilikan kendaraan bermotor pertama, kedua dan seterusnya sebagai dasar pengenaan tarif pajak progresif adalah berdasarkan atas urutan pendaftaran kendaraan bermotor tersebut pada Kantor Samsat.
- (7) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.⁷

Sebagaimana sedikit informasi yang saya dapatkan melalui wawancara tidak terstruktur bersama ibu Putri salah satu staf bagian viskal di lantai 2 samsat Palembang mengatakan bahwa benar ketentuan peraturan pajak Progresif kendaraan bermotor khususnya di kota Palembang sudah sesuai dengan apa yang diatur oleh Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Untuk menarik pajak progresif, Samsat Kota Palembang akan melihat alamat yang tertera dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor. Jikia dalam satu keluarga misalnya memiliki empat mobil dan atas nama yang sama maka secara otomatis akan dikenakan tarif pajak progresif. Selanjutnya apabila ada perubahan kepemilikan wajib pajak harus melaporkan untuk urutan kepemilikan. Kepemilikan kendaraan bermotor ini untuk penetapan pajak progresif kendaraan bermotor berdasarkan atas nama dan alamat yang sama serta jenis kendaraan. Maksudnya dari pernyataan tersebut adalah nama dan alamat yang sama dalam suatu keluarga yang dibuktikan dengan kartu keluarga yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang serta jenis kendaraan yang sama. Akan tetapi apabila didalam pencatatan nama dan alamat yang

⁷Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pasal 2 ayat 1-7

sama tersebut terdapat kesalahan penulisan huruf pada nama, maka tidak akan dikenakan pajak progresif, karena data yang didapat berbeda dengan pencatatan kepemilikan sebelumnya sehingga kepemilikan kendaraan kedua tidak dikenakan pajak progresif. Jadi intinya tidak selamanya wajib pajak selalu dikenakan Pajak Progresif.⁸

Tujuan dari dibuatnya peraturan pajak progresif kendaraan bermotor adalah untuk memenuhi rasa keadilan dan mempertimbangkan azas kemampuan wajib pajak atas kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya dimana orang yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar yang direpresentasikan dengan jumlah kendaraan yang dimiliki wajib pajak dalam arti ia mampu secara ekonomi.

Dan juga dengan diterapkannya kebijakan ini maka diharapkan kepemilikan kendaraan bermotor pribadi dapat berkurang dengan adanya tarif pajak progresif masyarakat dapat diajak berpikir untuk tidak memiliki kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat lebih dari satu. Sebab semakin banyaknya jumlah kendaraan maka semakin bertambah pula tingkat kemacetan dan polusi di Kota Palembang. Namun, berlakunya tarif pajak progresif ini dapat menimbulkan dua dampak positif bagi masyarakat dan pemerintah, dampak positif dari berlakunya pajak progresif kendaraan bermotor ini yaitu berkurangnya jumlah kendaraan bermotor, membuat masyarakat menjadi lebih taat hukum. Sedangkan dampak positif bagi pemerintah daerah, dengan berlakunya pajak progresif untuk kendaraan bermotor menyebabkan bertambahnya jumlah Pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah yaitu BAPENDA.

⁸*Wawancara* dengan Ibu Putri, Selaku Pegawai Negeri Sipil di SAMSAT Palembang Bagian Kepengurusan Pajak Progresif, tanggal 17 Juni 2019

B. Ketentuan Pelaksanaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Sebagai makhluk sosial manusia berinteraksi dengan manusia yang lainnya, demikian pula dengan tujuan ekonomi islam adalah menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera. Manusia wajib melaksanakan tugasnya terhadap Tuhan, dirinya, keluarganya dan seluruh umat manusia juga terhadap negaranya, salah satunya menunaikan kewajiban membayar zakat.

Dalam ajaran Islam pajak disebut dengan istilah *Adh-Dharibah* merupakan salah satu pendapatan negara berdasarkan ijtihad Ulil Amri yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (*ahlil halli wal aqdi*) dan persetujuan para ulama. Pajak (*Dharibah*) adalah kewajiban lain atas harta, yang datang disaat kondisi darurat atau kekosongan Baitul Mal yang dinyatakan dengan keputusan Ulil Amri. Ia adalah kewajiban atas kaum Muslim untuk membiayai pengeluaran kaum Muslim yang harus dibiayai secara kolektif (*ijtima'iyah*) seperti keamanan, pendidikan dan kesehatan, dimana tanpa pengeluaran itu akan terjadi bencana yang lebih besar. Dan ada istilah beberapa yang mirip dengan pajak salah satunya *al-jizyah* (upeti yang harus dibayar ahli kitab kepada pemerintah Islam), *al-Ustyr* (bea cukai bagi para pedagang non-muslim yang masuk ke negara Islam). Jika kita perhatikan istilah-istilah itu dapat kita simpulkan bahwa pajak sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang non-muslim sebagai bayaran jaminan keamanan. Maka ketika pajak tersebut diwajibkannya kepada kaum muslimin, para ulama berbeda pendapat dalam menyikapinya.⁹

Para ulama berbeda pendapat terhadap adanya pajak mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa telah menunaikan zakat maka bersihlah hartanya dan

⁹Gusfahmi, "*Pajak dalam Islam*", www.pajak.go.id/2016/pajak-dalam-islam, diakses senin 8 Juli 2019.

bebaslah kewajibannya. Di perbolehkan memungut pajak menurut para ulama tersebut alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah juga suatu kewajiban. Sebagaimana kaidah ushul fiqh: *Ma layatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajibun* (suatu kewajiban jika tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib). Oleh karena itu, pajak memang merupakan kewajiban warga negara muslim. Pajak juga merupakan kewajiban bagi setiap warga negara yang memenuhi kriteria wajib pajak. Bagi umat Islam ada kewajiban lainnya terkait pemotongan harta yaitu zakat.

Umat Islam tidak perlu mempertentangkan kedua kewajiban tersebut, karena dalam sistem ekonomi Islam dikenal dua sumber dana untuk menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat yaitu zakat dan pajak. Zakat dan Pajak meskipun sama-sama kewajiban, tetapi mempunyai dasar berpijak berlainan.

Zakat mengacu pada ketentuan syariat atau hukum Allah SWT baik dalam pemungutan dan penggunaannya, sedang pajak berpijak pada peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh *Ulil Amri* (Pemerintah) menyangkut pemungutan maupun penggunaannya.

Pajak boleh diambil dari kaum muslimin, jika memang negara sangat membutuhkannya, dan untuk menerapkan kebijaksanaan ini pun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat yaitu:

1. Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak.
2. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya.

Adapun dalil berdasarkan Qur'an dan Hadist yang mebolehkan hukum pajak yang menyatakan kebolehan mengambil pajak dari kaum muslimin, jika memang negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan kebijaksanaan inipun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat. Diantara ulama yang membolehkan pemerintahan Islam mengambil pajak dari kaum muslimin adalah Imam Ghozali, Imam Syatibi dan Imam Ibnu Hazm¹⁰. antara lain:

- QS. Al-Baqarah 2:177

❖ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
 وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ
 وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ
 الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya¹¹ kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta;

¹⁰Ahmadzain “Hukum Pajak Dalam Islam”, www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/2010/hukum-pajak-dalam-islam, diakses senin 8 Juli 2019.

¹¹Maksud dari memberikan harta yang dicintainya bahwa sepenggal Ayat ini memerintahkan kaum Muslim untuk memberikan harta selain Zakat. Pendapat ini didukung antara lain oleh Abu Zahrah, Imam al-Ghazali, Sa'id Hawwa, Sayyid Sabiq (Fiqhus Sunnah, Kitab Zakat, hal. 281)

dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa”

- Hadist

Hadist yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais juga, bahwa dia mendengar Rasulullah saw bersabda :

إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

"Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain zakat." (HR Tirmidzi, no: 595 dan Darimi, no : 1581, di dalamnya ada rawi : Abu Hamzah (Maimun), menurut Ahmad bin Hanbal dia adalah dho'if hadist, dan menurut Imam Bukhari : dia tidak cerdas)

Ulama yang berpendapat bahwa pajak itu boleh antara lain:

1. Abu Yusuf, dalam kitabnya al-Kharaj, menyebutkan bahwa: semua khulafa ar-rasyidin, terutama Umar, Ali dan Umar bin Abdul Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemakmuran, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Abu Yusuf mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani.
2. Ibn Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah, pajak pada semua orang dengan keadilan dan pemerataan, perlakuan semua orang sama dan jangan memberi perkecualian kepada siapa saja karena kedudukannya di masyarakat atau kekayaan, dan jangan mengecualikan kepada siapapun sekalipun petugasmu sendiri atau kawan akrabmu atau pengikutmu. Dan jangan kamu menarik pajak dari orang melebihi kemampuan membayarnya.

3. Maliki berpendapat, karena menjaga kemaslahatan umat melalui berbagai sarana-sarana seperti keamanan, pendidikan, dan kesehatan adalah wajib, sedangkan kas negara tidak mencukupi, maka pajak itu menjadi wajib. Walaupun demikian syara' mengharamkan negara menguasai harta benda rakyat dengan kekuasaannya. Jika negara mengambilnya dengan menggunakan kekuatan dengan cara paksa, bearti itu merampas, sedang merampas hukumnya haram.¹²

Di Indonesia ada beberapa pajak yang harus dibayar salah satunya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang secara progresif, akan tetapi pajak progresif itu sendiri memang belum diatur di dalam hukum islam, akan tetapi kewajiban pajak telah disosialisasikan secara menyeluruh sejak beberapa tahun lalu, begitupun zakat telah menjadi urusan negara sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 yang kemudia diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pajak dalam Islam merupakan hasil bentuk ijtihad dari para ulama maka hal ini berimplikasi kepada terjadinya *Ikhtilaf* perbedaan pendapat dikalangan para ulama mengenai konsep pajak dalam islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa para ulama dan ekonom Islam membolehkan pajak karena adanya kondisi tertentu, misalnya harus adil, merata, tidak membebani, dan lain-lain.

Jadi penerapan pajak progresif kendaraan bermotor khususnya di kota Palembang ini berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang pajak daerah menurut hukum Islam diperbolehkan, dengan alasan untuk membantu pemerintah Kota Palembang dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah dan untuk kemaslahatan umat.

¹²Amwaluna, "konsep Pajak Dalam Hukum Islam" Vol 1, No 2, Juli 2017, hlm 174. Diakses 2 juli 2019.